

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE OCCUPATIONAL HEALTH EFFORT POST (POS UKK) AT KOTO BARU COMMUNITY HEALTH CENTER IN 2025

ANALISIS PENYELENGGARAAN POS UPAYA KESEHATAN KERJA (POS UKK) DI UPTD PUSKESMAS KOTO BARU TAHUN 2025

Vidia Putri Maharani ¹⁾, Doni Jepisah ²⁾, Siti Aisyah ³⁾

¹⁾²⁾ Universitas Hang Tuah Pekanbaru 1, ³⁾ Puskesmas Koto Baru,

e-mail : Vidiapm95@gmail.com

ABSTRACT

The Occupational Health Effort Post (Pos Upaya Kesehatan Kerja/Pos UKK) is a community-based health service designed to improve the occupational health and safety of informal sector workers through promotive, preventive, basic curative, and rehabilitative interventions. However, the implementation of Pos UKK in many community health centers remains suboptimal due to various organizational and resource-related constraints. This study aimed to analyze the implementation of the Occupational Health Effort Post (Pos UKK) at the Koto Baru Community Health Center in 2025 and to identify factors influencing its implementation as the basis for developing improvement strategies. This study employed a descriptive qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with key informants, field observations, and document reviews. Data were analyzed using thematic analysis, while source and method triangulation were applied to ensure data credibility. The findings revealed that the implementation of Pos UKK had not been carried out optimally due to the absence of a dedicated budget, limited management commitment, inadequate competency of health personnel and occupational health cadres, weak cross-sectoral coordination, and the lack of a structured monitoring and evaluation system. Recommended improvement strategies include strengthening human resource capacity through training, policy advocacy to secure financial support, enhancing cross-sector collaboration, and establishing a sustainable monitoring and evaluation system. These strategies are expected to improve the effectiveness of Pos UKK implementation and strengthen occupational health services for informal sector workers.

Keywords: UKK Posts, Community Health Centers, occupational health, the informal sector, health policy

ABSTRAK

Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan berbasis masyarakat yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan keselamatan kerja pekerja sektor informal melalui upaya promotif, preventif, kuratif sederhana, dan rehabilitatif. Namun, implementasi Pos UKK di berbagai puskesmas masih menghadapi berbagai kendala sehingga pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di UPTD Puskesmas Koto Baru Tahun 2025 serta

mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya sebagai dasar penyusunan strategi perbaikan program. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci, observasi lapangan, dan telaah dokumen program. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dengan menerapkan triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pos UKK belum berjalan secara optimal. Permasalahan utama meliputi belum tersedianya alokasi anggaran khusus, rendahnya komitmen manajemen puskesmas, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dan kader kesehatan kerja, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Upaya perbaikan yang direkomendasikan meliputi penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, advokasi kebijakan untuk memperoleh dukungan anggaran, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan. Implementasi strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pos UKK dan mendukung pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja sektor informal.

Kata Kunci: Pos UKK, Puskesmas, kesehatan kerja, sektor informal, kebijakan kesehatan

LATAR BELAKANG

Upaya Kesehatan Kerja (UKK) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan masyarakat yang bertujuan melindungi, memelihara, dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, khususnya bagi pekerja sektor informal yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan kerja formal. Di Indonesia, pekerja sektor informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan sehingga menjadi kelompok yang rentan mengalami penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja. Oleh karena itu, pengembangan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) menjadi salah satu strategi pemerintah dalam memperluas cakupan pelayanan kesehatan kerja berbasis masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Penyelenggaraan Pos UKK merupakan implementasi pelayanan kesehatan kerja di tingkat masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif pekerja, kader kesehatan, puskesmas, serta dukungan lintas sektor. Keberadaan Pos UKK diharapkan mampu

meningkatkan kesadaran pekerja terhadap risiko kerja, mendorong perilaku kerja yang aman, serta menurunkan kejadian penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Namun demikian, pelaksanaan Pos UKK di berbagai daerah masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya dukungan pembiayaan, rendahnya komitmen pemangku kepentingan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor (Kementerian Kesehatan RI, 2023; ILO, 2022).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari separuh tenaga kerja di Indonesia bekerja pada sektor informal yang umumnya belum memperoleh pelayanan kesehatan kerja secara optimal (BPS, 2024). Kondisi tersebut menyebabkan pekerja sektor informal memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap paparan bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomi, maupun psikososial yang dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup pekerja. Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) juga melaporkan bahwa penyakit dan kecelakaan akibat kerja masih menjadi

penyebab utama hilangnya produktivitas kerja serta menimbulkan beban ekonomi yang besar di berbagai negara berkembang (ILO, 2022).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi Pos UKK memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, perilaku keselamatan kerja, serta deteksi dini penyakit akibat kerja pada pekerja sektor informal. Penelitian Sari dan Yuliana (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan Pos UKK dipengaruhi oleh kompetensi kader, dukungan puskesmas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian lain oleh Rahmawati et al. (2023) menemukan bahwa keberlanjutan Pos UKK sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen puskesmas, dukungan pemerintah daerah, serta kolaborasi lintas sektor. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada evaluasi pelaksanaan program atau tingkat partisipasi masyarakat, sedangkan kajian yang menganalisis penyelenggaraan Pos UKK secara komprehensif dari aspek manajemen program, faktor internal dan eksternal organisasi, serta penyusunan strategi intervensi masih relatif terbatas.

UPTD Puskesmas Koto Baru merupakan salah satu puskesmas yang memiliki wilayah kerja dengan mayoritas penduduk bekerja pada sektor perkebunan kelapa sawit dan karet yang memiliki berbagai potensi risiko kesehatan kerja. Namun hingga tahun 2025, Pos UKK belum terselenggara secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan nasional mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dengan implementasi program di tingkat puskesmas. Identifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya penyelenggaraan Pos UKK sangat diperlukan sebagai dasar dalam

penyusunan strategi penguatan program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dengan menganalisis penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di UPTD Puskesmas Koto Baru melalui identifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi implementasi program serta penyusunan alternatif strategi perbaikan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi puskesmas dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di UPTD Puskesmas Koto Baru Tahun 2025 sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja sektor informal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di UPTD Puskesmas Koto Baru Tahun 2025. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan kondisi implementasi program secara komprehensif berdasarkan pengalaman dan perspektif para pemangku kepentingan yang terlibat.

Penelitian dilaksanakan di UPTD Puskesmas Koto Baru pada tahun 2025. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada belum optimalnya penyelenggaraan Pos UKK meskipun wilayah kerja puskesmas didominasi oleh pekerja sektor informal yang memiliki risiko kesehatan kerja cukup tinggi.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan

bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program. Informan terdiri atas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program Upaya Kesehatan Kerja (UKK), petugas promosi kesehatan, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pos UKK.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap kondisi sarana, prasarana, serta proses pelaksanaan program di lapangan, dan studi dokumentasi terhadap profil puskesmas, laporan capaian program, dokumen perencanaan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pos UKK.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan telaah dokumen sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipercaya.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan pengumpulan data, kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh tema-tema yang menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi penyelenggaraan Pos UKK di UPTD Puskesmas Koto Baru serta alternatif strategi perbaikan program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UPTD Puskesmas Koto Baru memiliki wilayah kerja yang mencakup empat desa dengan jumlah penduduk sebanyak 13.648 jiwa. Sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor informal sebagai petani kelapa sawit dan petani karet. Karakteristik pekerjaan tersebut memiliki potensi risiko kesehatan kerja yang cukup tinggi, seperti paparan pestisida, cedera akibat penggunaan alat kerja, gangguan muskuloskeletal, kelelahan kerja, serta risiko penyakit akibat kerja lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) menjadi salah satu kebutuhan pelayanan kesehatan yang penting dalam meningkatkan derajat kesehatan pekerja sektor informal.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen diperoleh informasi bahwa hingga tahun 2025 Pos UKK di UPTD Puskesmas Koto Baru belum terselenggara secara optimal. Hasil analisis menggunakan metode Urgency, Seriousness, and Growth (USG) menunjukkan bahwa belum terselenggaranya Pos UKK merupakan masalah yang memiliki tingkat urgensi tertinggi dibandingkan permasalahan program lainnya. Kondisi tersebut menjadi prioritas karena berpotensi memengaruhi akses pekerja sektor informal terhadap pelayanan kesehatan kerja yang berkesinambungan.

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023), Pos UKK merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat pekerja dalam mengenali faktor risiko kerja, melakukan upaya pencegahan penyakit akibat kerja, serta meningkatkan perilaku kerja yang aman dan sehat. Dengan demikian, keberadaan Pos UKK tidak hanya

berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai media pemberdayaan masyarakat dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pos UKK belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya komitmen manajemen puskesmas, keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur.

Komitmen Manajemen Puskesmas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen manajemen menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi penyelenggaraan Pos UKK. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa program Pos UKK belum menjadi prioritas dalam perencanaan program puskesmas sehingga belum terdapat perencanaan operasional maupun target capaian program secara khusus. Akibatnya, kegiatan pembentukan Pos UKK belum terlaksana secara sistematis dan berkelanjutan.

Secara teoritis, implementasi suatu program kesehatan sangat dipengaruhi oleh fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) sebagaimana dikemukakan oleh Terry (2019). Apabila salah satu fungsi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka efektivitas implementasi program akan menurun. Dalam konteks penelitian ini, lemahnya fungsi perencanaan menyebabkan Pos UKK belum memperoleh dukungan sumber daya maupun kebijakan yang memadai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmawati et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi Pos UKK dipengaruhi oleh komitmen pimpinan puskesmas dalam menetapkan program sebagai prioritas pelayanan kesehatan masyarakat. Penelitian Suryani et al. (2022) juga menjelaskan bahwa dukungan manajemen berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program kesehatan kerja melalui penyediaan kebijakan, pembiayaan, dan sumber daya manusia.

Keterbatasan Anggaran

Penelitian ini menemukan bahwa belum tersedianya alokasi anggaran khusus menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan Pos UKK. Selama ini kegiatan kesehatan kerja masih diintegrasikan dengan program lain sehingga pelaksanaan pembentukan Pos UKK, pelatihan kader, penyediaan media edukasi, maupun kegiatan monitoring belum dapat dilakukan secara optimal.

Menurut teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III (1980), sumber daya (resources) merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi anggaran, tenaga, fasilitas, informasi, dan kewenangan. Keterbatasan salah satu komponen tersebut akan berdampak pada rendahnya efektivitas pelaksanaan program.

Temuan penelitian ini sesuai dengan penelitian Pratiwi et al. (2022) yang menunjukkan bahwa keterbatasan pembiayaan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program kesehatan berbasis masyarakat di puskesmas. Penelitian Nugroho dan Handayani (2024) juga menyatakan bahwa keberlanjutan Pos UKK sangat bergantung pada dukungan

pendanaan yang memadai dari pemerintah daerah maupun sumber pembiayaan lainnya.

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kesehatan maupun kader belum pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai penyelenggaraan Pos UKK. Kondisi tersebut menyebabkan pemahaman mengenai pembentukan Pos UKK, identifikasi faktor risiko kerja, serta pelaksanaan kegiatan promotif dan preventif masih terbatas.

Menurut teori pengembangan sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Dessler (2020), pelatihan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi individu sehingga mampu melaksanakan tugas secara efektif. Dalam konteks pelayanan kesehatan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor penting dalam menjamin mutu pelayanan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sari dan Yuliana (2021) yang menyatakan bahwa kompetensi kader merupakan faktor dominan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pos UKK. Penelitian Lestari et al. (2023) juga menemukan bahwa pelatihan kader secara berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kerja dan partisipasi masyarakat pekerja.

Koordinasi Lintas Sektor

Koordinasi lintas sektor di UPTD Puskesmas Koto Baru belum berjalan secara optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kerja sama antara puskesmas, pemerintah desa, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemangku kepentingan lainnya masih

terbatas sehingga belum mampu mendukung pembentukan Pos UKK secara berkelanjutan.

Menurut pendekatan Primary Health Care (PHC) yang dikembangkan oleh WHO, kolaborasi lintas sektor merupakan salah satu strategi utama dalam meningkatkan keberhasilan pelayanan kesehatan masyarakat. Permasalahan kesehatan kerja tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai sektor yang memiliki kewenangan dan sumber daya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri et al. (2024) yang menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi Pos UKK di tingkat puskesmas. Semakin baik koordinasi antarinstansi, semakin tinggi keberlanjutan program kesehatan kerja di masyarakat.

Monitoring dan Evaluasi Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur untuk menilai capaian penyelenggaraan Pos UKK. Tidak adanya indikator kinerja maupun mekanisme pelaporan menyebabkan pelaksanaan program sulit dievaluasi secara berkala sehingga perbaikan program belum dapat dilakukan secara optimal.

Menurut teori manajemen kesehatan masyarakat, monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus manajemen program yang berfungsi untuk mengukur pencapaian tujuan, mengidentifikasi hambatan, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perbaikan program. Monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan akan menghasilkan informasi yang akurat bagi pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Widodo et al. (2023) yang menyatakan bahwa sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kesehatan masyarakat serta mempercepat pencapaian indikator kinerja pelayanan kesehatan.

KESIMPULAN

Penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) di UPTD Puskesmas Koto Baru Tahun 2025 belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, belum optimalnya penyelenggaraan Pos UKK dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu belum adanya komitmen manajemen yang kuat dalam menetapkan Pos UKK sebagai program prioritas, keterbatasan alokasi anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan kader kesehatan kerja, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta belum tersedianya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur. Kondisi tersebut mengakibatkan pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja sektor informal belum dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pos UKK tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan kebijakan, tetapi juga memerlukan dukungan manajemen, pembiayaan, sumber daya manusia yang kompeten, kemitraan lintas sektor, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan tata kelola program melalui peningkatan komitmen pimpinan puskesmas, pengalokasian anggaran khusus, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader melalui pelatihan, penguatan koordinasi dengan pemerintah desa dan sektor terkait, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi UPTD Puskesmas Koto Baru, Dinas Kesehatan Kabupaten, dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan serta strategi penguatan penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK). Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan program kesehatan kerja pada puskesmas lain yang memiliki karakteristik wilayah dengan dominasi pekerja sektor informal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, UPTD Puskesmas Koto Baru perlu memperkuat penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) melalui penyusunan kebijakan internal yang menjadikan Pos UKK sebagai salah satu program prioritas. Penguatan komitmen manajemen perlu diikuti dengan penyusunan rencana operasional program, pengalokasian anggaran yang memadai, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan kader melalui pelatihan yang berkelanjutan agar mampu melaksanakan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan pedoman yang berlaku.

Dinas Kesehatan Kabupaten diharapkan memberikan pendampingan teknis, pembinaan, dan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan Pos UKK di puskesmas, termasuk memfasilitasi koordinasi lintas sektor dengan pemerintah desa, Dinas Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung keberlanjutan program.

Selain itu, perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis indikator kinerja sehingga pelaksanaan Pos UKK dapat dipantau secara berkala, hambatan pelaksanaan dapat diidentifikasi lebih dini, dan tindak lanjut perbaikan

program dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan pendekatan mixed methods atau melakukan evaluasi efektivitas implementasi Pos UKK pada beberapa puskesmas sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan penyelenggaraan Pos UKK serta model intervensi yang paling efektif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kerja bagi pekerja sektor informal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada UPTD Puskesmas Koto Baru yang telah memberikan izin, dukungan, dan akses selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan penelitian yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi turut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten serta semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kerja sama dalam pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2024). Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2024. Badan Pusat Statistik.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Dessler, G. (2020). *Human Resource Management* (16th ed.). Pearson.

Edwards, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

International Labour Organization. (2022). *World Employment and Social Outlook: Trends 2022*. International Labour Office.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Penyelenggaraan Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK)*. Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kementerian Kesehatan RI.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Notoatmodjo, S. (2018). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta.

Terry, G. R. (2019). *Principles of Management*. Richard D. Irwin.

World Health Organization. (2022). WHO
Guidelines on Healthy Workplaces.
World Health Organization.

JHAM

